



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 100.3.3.2/ 34 /KPTS/402.013/2024
TENTANG
DAFTAR DATA
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024

BUPATI MADIUN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan Satu Data Kabupaten Madiun dan untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, perlu menyusun Daftar Data Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorale oleh Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
15. Peraturan Bupati Madiun Nomor 24 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun;
16. Peraturan Bupati Madiun Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Data Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Madiun Tahun 2024;

- KETIGA : Dalam rangka penyelenggaraan Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Perangkat Daerah wajib mengajukan rekomendasi dan metadata kegiatan statistik kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Caruban

pada tanggal 12 JAN 2024



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Inspektur Kab. Madiun;
2. Kepala Perangkat Daerah Kab. Madiun;
3. Kepala Bapperida Kab. Madiun;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Madiun;
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 100.3.3.2/ 34 /KPTS/402.013/2024
TENTANG
DAFTAR DATA PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2024

DAFTAR DATA PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024

No.	Nama Data	Produsen Data	Sumber Refrensi	Jadwal Rilis dan / atau Pemutakhiran Data
1	2	3	4	5
1	Indeks Capaian SPM Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Renstra Tahun 2024-2026	Tahunan
	Indeks Pendidikan		RPD Tahun 2024-2026	
	Angka partisipasi pendidikan kesetaraan			
	Angka Partisipasi Sekolah PAUD			
	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar			
	Indeks Iklim Keamanan SD			
	Indeks Iklim Keamanan SMP			
	Indeks Iklim Kebinekaan SD			
	Indeks Iklim Kebinekaan SMP			
	Indeks Inklusivitas SD			
	Indeks Inklusivitas SMP			
	Persentase satuan pendidikan PAUD yang terakreditasi minimal B			
	Rerata kemampuan literasi SD			
	Rerata kemampuan literasi SMP			
	Rerata kemampuan Numerasi SD			
	Rerata kemampuan Numerasi SMP			
	Persentase Peserta didik yang memenuhi KKM muatan lokal			

1	2	3	4	5
	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV			
	Persentase tenaga pendidik yang tersertifikasi			
	Persentase budaya lokal yang dikembangkan			
	Cakupan pembinaan sejarah			
	Persentase cagar budaya yang ditetapkan			
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah			
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			
	Jumlah Guru PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Jenis Kelamin		SPM & Data Provinsi	Tahunan
	Jumlah Guru PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Pendidikan Terakhir			
	Jumlah Guru PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Menurut Kecamatan			
	Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status (Negeri/Swasta)			
	Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan menurut Kecamatan			
	Jumlah murid SD/ sederajat usia 7-12 tahun		SPM	Tahunan
	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang masih bersekolah			
	Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Jenis Kelamin	SPM & Data Provinsi	Tahunan	

1	2	3	4	5
	Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status (Negeri/Swasta)			
	Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status Kesiswaan			
	Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Agama			
	Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Menurut Kecamatan			
	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		SPM	Tahunan
	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)			
	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			
	Terlestarikannya cagar budaya		LPPD	Tahunan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama			
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD			
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar			
	Jumlah Guru PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Jenis Kelamin		SPM & Data Provinsi	Tahunan

1	2	3	4	5
	Jumlah Guru PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Pendidikan Terakhir			
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		LPPD	Tahunan
	Cakupan pembinaan sejarah		RPD Tahun 2024-2026	Tahunan
2	Indeks Kesehatan	Dinas Kesehatan	Renstra Tahun 2024-2026	Tahunan
	Indeks Keluarga Sehat			
	IKM Kesehatan			
	Angka Harapan Hidup			
	Angka Kematian Bayi			
	Angka Kematian Ibu			
	Persentase pemenuhan tenaga kesehatan pada puskesmas (9 tenaga kesehatan)			
	Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas			
	Prevalensi Balita Stunting			
	Rasio tenaga kesehatan (paramedis) terhadap jumlah penduduk			
	Rasio tenaga kesehatan (Medis) terhadap jumlah penduduk			
	Persentase sarana farmasi ,alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar			
	Persentasi UKBM yang di lakukan pembinaan			
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah			
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			

1	2	3	4	5
	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup		SDGs	Tahunan
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup			
	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)			
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		SPM & LPPD	Tahunan
	Jumlah Bayi Berdasarkan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Menurut Kecamatan		Data Provinsi	Tahunan
	Jumlah desa siaga aktif Purnama Mandiri (PURI) Menurut Kecamatan			
	Jumlah desa/kelurahan yang sudah Stop Buang Air Besar di Sembarang Tempat (Stop BABS) Menurut Kecamatan			
	Jumlah Kasus Penyakit Diftery, Pertusis, Tetanus, Hepatitis B dan Suspek Campak yang Dapat Dicegah dengan imunisasi Menurut Kecamatan			
	Jumlah Kasus Penyakit Menular Menurut Kecamatan			
	Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular Menurut Kecamatan			
	Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) Di Desa/Kelurahan Yang Ditangani < 24 Jam Menurut Kecamatan			
	Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan			
	Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan sesuai standar Menurut Kecamatan			

1	2	3	4	5
	Jumlah Posyandu per Kecamatan			
	Jumlah puskesmas berdasarkan pelayanan rawat inap dan non rawat inap Menurut Kecamatan			
	Jumlah rumah sakit berdasarkan akreditasi rumah sakit Menurut Kecamatan			
	Jumlah rumah sakit berdasarkan jenis rumah sakit Menurut Kecamatan			
	Jumlah rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit Menurut Kecamatan			
	Jumlah screening Penyakit Tidak Menular (PTM) bagi penduduk berisiko usia >15 tahun secara kumulasi Menurut Kecamatan			
	Jumlah Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks Menurut Kecamatan			
	Jumlah tempat tidur di rumah sakit berdasarkan kelas Menurut Kecamatan			
	Jumlah tenaga kesehatan Menurut Kecamatan			
	Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan Menurut Kecamatan			
	Kejadian Malaria per 1000 orang		SDGs	Tahunan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		SPM & LPPD	Tahunan
	Persentase Balita obesitas (BB/TB) kelompok umur 0-59 bulan		SDGs	Tahunan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		SPM & LPPD	Tahunan
	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif		SDGs	Tahunan

1	2	3	4	5
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		SPM & LPPD	Tahunan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			
	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi		SDGs	Tahunan
	Persentase keberhasilan pengobatan TB			
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		SPM & LPPD	Tahunan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar			
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar			
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			
	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
	Persentase penderita HIV yang mendapat ARV		SDGs	Tahunan
	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi		LPPD	Tahunan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		SPM & LPPD	Tahunan
	Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita (0-23 bulan)		SDGs	Tahunan

1	2	3	4	5
	Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita (0-59 bulan)			
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta			
	Prevalensi tekanan darah tinggi			
	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan		LPPD	Tahunan
	Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit (RSUD Caruban)	RSUD Caruban	Renstra Tahun 2024-2026	Tahunan
	Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit (RSUD Dolopo)			
3	Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Renstra Tahun 2024-2026	Tahunan
	Indeks Infrastruktur Wilayah		RPD Tahun 2024-2026	
	Persentase Luas Baku Sawah yang Terlayani Air Irigasi			
	Persentase Meningkatnya Pelayanan Air Minum			
	Persentase Meningkatnya Pelayanan Sanitasi Layak			
	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik			
	Persentase panjang trotoar dalam kondisi baik			
	Penataan bangunan gedung baik			
	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap			
	Persentase dokumen pengembangan jasa konstruksi yang sesuai dengan ketentuan			
	Ketaatan terhadap dokumen rencana tata ruang			

1	2	3	4	5
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah			
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
	Jumlah Rumah Tangga (RT) yang terlayani pengolahan Air Limbah Domestik menurut kecamatan		Data Provinsi	Semesteran
	Jumlah Rumah Tangga (RT) yang memiliki akses sanitasi layak menurut kecamatan			
	Jumlah Rumah Tangga (RT) yang terlayani akses air minum menurut kecamatan			
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		LPPD	Tahunan
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga			
	Rasio kepatuhan IMB			
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi			
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten			
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi			
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis			

1	2	3	4	5
	yang memiliki sertifikat kompetensi			
	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten			
4	Cakupan Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Renstra Tahun 2024-2026	Tahunan
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani			
	Persentase terpenuhinya kebutuhan PSU		RPD Tahun 2024-2026	
	Cakupan Kawasan kumuh yang tertangani			
	Cakupan perumahan yang telah ditingkatkan prasarana, sarana, dan utilitas umumnya			
	Persentase sengketa tanah yang tertangani			
	Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan			
	Persentase Dokumen Tanah kosong yang dikelola			
	Persentase dokumen penatagunaan tanah yang terselesaikan			
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah			
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
	Jumlah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota menurut kecamatan		Data Provinsi	Semesteran
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		LPPD	Tahunan
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) menurut kecamatan		Data Provinsi	Semesteran

1	2	3	4	5
	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana menurut kecamatan			
	Jumlah Rumah yang terkena bencana alam menurut kecamatan			
	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni		SPM	Tahunan
	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni			
	Luas kawasan permukiman kumuh menurut kecamatan		Data Provinsi	Semesteran
	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi		LPPD	Tahunan
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani			
5	Indeks Pencapaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Renstra Tahun 2024-2026	Tahunan
	Indeks Stabilitas			
	Respon Time Rate Penanganan Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran			
	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani		RPD Tahun 2024-2026	
	Persentase perda/perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan			
	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani			
	Persentase kejadian Non Kebakaran yang tertangani			

1	2	3	4	5
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah			
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara		SPM	Tahunan
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran		SPM	
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Non kebakaran		SPM	
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		LPPD	
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		LPPD	
6	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Renstra Tahun 2024-2026	Tahunan
	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)			
	Jumlah Warga Negara di Kawasan Rawan Bencana yang memperoleh layanan Mitigasi		RPD Tahun 2024-2026	
	Persentase Kejadian Bencana yang Ditangani			
	Persentase Pemulihan Pasca Bencana yang Direalisasikan			
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah			
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			

1	2	3	4	5
	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana		SPM & LPPD	Tahunan
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
7	Persentase cakupan pelayanan PPKS	Dinas Sosial	RPD Tahun 2024-2026	Tahunan
	Persentase PPKS yang terlayani			
	Persentase Kelompok Masyarakat Miskin PPKS kewenangan Pemberdayaan Sosial yang dibina dan diberdayakan		RPD Tahun 2024-2026	
	Persentase PSKS yang dibina dan diberdayakan			
	Persentase PPKS yang tertangani			
	Prosentase Masyarakat Miskin yang mendapat bantuan tepat sasaran (PKH dan Keluarga Miskin Kewenangan Kab/Kota)			
	Prosentase Masyarakat miskin yang mendapatkan Jaminan Kesehatan			
	Persentase Masyarakat miskin yang mendapatkan Bantuan Tepat Sasaran (paska korban bencana alam dan sosial)			
	Persentase PSKS yang dibina			
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah			
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			

1	2	3	4	5
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		SPM	Tahunan
	Jumlah Anak terlantar di luar panti sosial berdasarkan jenis kelamin menurut Kecamatan		SPM & Data Provinsi	Tahunan
	Jumlah Gelandangan dan Pengemis di luar panti sosial berdasarkan jenis kelamin menurut Kecamatan			
	Jumlah Korban Bencana Alam menurut jenis bencana			
	Jumlah Korban Bencana Sosial menurut jenis bencana			
	Jumlah Lanjut Usia Terlantar di luar panti sosial berdasarkan jenis kelamin menurut Kecamatan			
	Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar berdasarkan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)		SPM	Tahunan
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial berdasarkan jenis kelamin menurut Kecamatan		SPM & Data Provinsi	Tahunan
	Jumlah PMKS di luar panti sosial berdasarkan jenis kelamin			
	Jumlah PMKS di luar panti sosial menurut Kecamatan			
	Jumlah Pusat Kesejahteraan Sosial menurut Kecamatan			
	Jumlah Relawan Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan		Data Provinsi	Tahunan

1	2	3	4	5
	Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial menurut Kecamatan		SPM & Data Provinsi	Tahunan
	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan			
	Jumlah Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti		SPM	Tahunan
	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti			
	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/Kota			
	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti			
	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			
	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti			
	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			

1	2	3	4	5
	Persentase Fakir Miskin yang memperoleh bantuan sosial dan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya		SDGs	Tahunan
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten		LPPD	Tahunan
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		SDGs	Tahunan
	Persentase Penyandang Cacat yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya		LPPD	Tahunan
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Renstra Tahun 2024-2026	Tahunan
	PDRB Sektor Industri Pengolahan.			
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)			
	Persentase Penempatan tenaga kerja		RPD Tahun 2024-2026	
	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan di luar pengadilan			
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak			
	Persentase peserta Pelatihan yang bersertifikat			
	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri			
	Persentase IKM yang terfasilitasi perijinan			

1	2	3	4	5
	Persentase IKM yang memanfaatkan SIINas			
	Persentase transmigran umum yang dipindahkan dan ditempatkan			
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah			
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
	Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme AKAN		SDGs	Tahunan
	Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan		LPPD	Tahunan
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja			
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)			
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi			
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja			
9	IndeksKetahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Renstra Tahun 2024-2026	Tahunan
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan			
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi			
	Angka produksi ton:			
	Daging			
	Telur			
	Susu			

1	2	3	4	5
	Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP)		RPD Tahun 2024-2026	
	Persentase daerah berpotensi rawan pangan yang tertangani			
	Persentase pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang aman			
	Persentase peningkatan jumlah ternak			
	Persentase prasarana peternakan dalam keadaan baik			
	Persentase Hewan Ternak dalam Keadaaan Sehat			
	Persentase Peningkatan Jumlah Peternak			
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah			
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)		LPPD	Tahunan
	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular			
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Dinas Lingkungan Hidup	Renstra Tahun 2024-2026	Tahunan
	Indeks Kualitas Air (IKA)			
	Indeks Kualitas Udara (IKU)			
	Indeks Kualitas tutupan lahan (ITH))			
	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)			

1	2	3	4	5
	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang sesuai ketentuan		RPD Tahun 2024-2026	
	Persentase layanan pelaku usaha dan kegiatan yang menerapkan dokumen lingkungan			
	Cakupan penghijauan wilayah potensi longsor dan sumber mata air			
	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola			
	Persentase industri/pelaku usaha yang menerapkan sistem pengolahan Limbah B3			
	Persentase izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan			
	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup			
	Jumlah penerima penghargaan lingkungan hidup			
	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani			
	Persentase sampah yang tertangani			
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah			
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
	Indeks Kualitas Air		SDGs	Tahunan
	Indeks tutupan hutan			

1	2	3	4	5
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota		LPPD	Tahunan
11	IKM Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Renstra Tahun 2024-2026	Tahunan
	Persentase kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	Persentase Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dimanfaatkan			
	Persentase Penduduk Yang Memiliki Dokumen Kependudukan		RPD Tahun 2024-2026	
	Persentase Penduduk Yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil			
	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
	Persentase Profil Kependudukan Yang Terkelola			
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah			
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		LPPD	Tahunan
	Persentase Profil Kependudukan Yang Terkelola Kepemilikan akta kelahiran Perekaman KTP Elektronik			

1	2	3	4	5
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA			
	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama			
12	Persentase Desa Mandiri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Renstra Tahun 2024-2026	Tahunan
	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa berkinerja baik		RPD Tahun 2024-2026	
	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang berdaya			
	Persentase desa yang telah menyelenggarakan penataan desa dengan baik			
	Persentase Kerjasama Desa yang berjalan dengan baik			
	Persentase Desa dengan kualitas perencanaan pembangunan yang baik			
	Persentase Desa dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib			
	Persentase BUMDesa Maju			
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif			
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
	Persentase Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD			
	Jumlah Desa Mandiri		SDGs	Tahunan
	Jumlah desa tertinggal		LPPD	Tahunan
	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri			

1	2	3	4	5
13	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Renstra Tahun 2024-2026	Tahunan
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD			
	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO(Tindak Pidana Perdagangan Orang)			
	Rasio Kekerasan terhadap Anak			
	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)			
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)		RPD Tahun 2024-2026	
	Persentase keluarga sejahtera			
	Persentase dokumen data informasi kependudukan yang tersusun			
	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP			
	Persentase Pasangan Usia Subur yang tidak ber-KB karena Unmet Need			
	Persentase perkawinan dengan usia istri dibawah 20 Tahun			
	Kepuasan ASN terhadap pelayanankesekretariatan Perangkat Daerah			
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang aktif			
Persentase kasus kekerasan pada perempuan yang ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan				

1	2	3	4	5
	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang aktif			
	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan			
	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)		SDGs	Tahunan
	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern			
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani		LPPD	Tahunan
	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)		SDGs	Tahunan
	Persentase Penanganan Perempuan Korban Kekerasan			
	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin (kelompok penduduk 40% terbawah)			
	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern			
	Total Fertility Rate (TFR)			
	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)			
14	Persentase sarana prasarana perlengkapan jalan kondisi baik	Dinas Perhubungan	RPD Tahun 2024-2026	Tahunan
	Persentase Kendaraan laik jalan			

1	2	3	4	5
	Persentase Manajemen rekayasa lalu lintas			
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah			
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
	Rasio konektivitas		LPPD	Tahunan
	V/C Ratio di Jalan Kabupaten		LPPD	Tahunan
15	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Renstra Tahun 2024-2026	Tahunan
	Indeks Layanan SPBE			
	Tingkat keamanan informasi pemerintah (indeks kami)			
	Persentase desiminasi layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan		RPD Tahun 2024-2026	
	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan layanan SPBE			
	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah			
	Persentase Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah			
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah			
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			

1	2	3	4	5
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		LPPD	Tahunan
	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah			
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo			
16	Laju PDRB sektor perdagangan tahun N	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Renstra Tahun 2024-2026	Tahunan
	Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro			
	Persentase Peningkatan Volume Perdagangan			
	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi			
	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro			
	Pertumbuhan Usaha Mikro yang formal			
	Inflasi Pangan Bergejolak			
	Persentase stabilitas stok barang kebutuhan pokok dan barang penting			

1	2	3	4	5
	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		RPD Tahun 2024-2026	
	Persentase Peningkatan Koperasi Aktif			
	Persentase Stabilitas Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			
	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			
	Persentase izin usaha simpan pinjam yang telah diterbitkan			
	Jumlah Koperasi sehat			
	Persentase koperasi yang telah dilatih			
	Persentase koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi			
	Persentase usaha mikro yang terbina			
	Persentase Usaha Mikro Yang Telah Terfasilitasi Pengembangan Produk			
	Persentase peningkatan dokumen perizinan yang diterbitkan			
	Persentase peningkatan pengawasan B2 pada Pengguna Akhir			
	Persentase peningkatan pengelola sarana distribusi perdagangan yang telah dibina dan telah diperdayakan			
	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan yang tersedia			
	Persentase peningkatan pemasaran produk berkualitas ekspor			
	Persentase peningkatan pelaku usaha dibidang metrologi legal yang terbina dan UtTp yang terawasi			

1	2	3	4	5
	Persentase peningkatan UTTP yang tertera/tertera ulang			
	Persentase Peningkatan Fasilitas P3DN (Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri)			
	Persentase Koefisien Variasi Harga			
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah			
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha		LPPD	Tahunan
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku			
	Persentase kinerja realisasi pupuk			
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)			
17	Nilai realisasi investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Renstra Tahun 2024-2026	Tahunan
Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan PTSP	RPD Tahun 2024-2026			
Jumlah Investor				
Jumlah Investor Baru				
Nilai SKM Pelayanan Perizinan Non Perizinan				
Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM				
Nilai SKM atas Pelayanan				

1	2	3	4	5
	Data dan Informasi			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah			
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten		LPPD	Tahunan
18	Persentase pelaku ekonomi kreatif	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Renstra Tahun 2024-2026	Tahunan
	Jumlah kunjungan wisata		RPD Tahun 2024-2026	
	Spending Of Money			
	Persentase pemuda yang berprestasi			
	Jumlah cabang olahraga yang dibina			
	Presentase pemuda aktif dalam organisasi			
	Jumlah atlit berprestasi			
	Persentase peningkatan daya tarik pada destinasi pariwisata			
	Jumlah pemasaran pariwisata yang masif			
	Peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif			
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah			
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD		SDGs	Tahunan
	Peningkatan Prestasi Olahraga		LPPD	Tahunan
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten			

1	2	3	4	5
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan Tingkat Hunian Akomodasi Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan			
19	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Nilai Pengawasan kearsipan Persentase OPD yang Pengelolaan Arsipnya berkategori Cukup Persentase Perpustakaan Terakreditasi Indeks Ketersediaan Arsip Indeks Keberadaan dan Keutuhan Arsip Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Renstra Tahun 2024-2026 RPD Tahun 2024-2026 LPPD	Tahunan Tahunan
20	PDRB sektor Pertanian Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Pertanian dan Perikanan	Renstra Tahun 2024-2026 RPD Tahun 2024-2026	Tahunan

1	2	3	4	5
	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya			
	Persentase Peningkatan Hasil Produk Olahan Asal Ikan			
	Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian			
	Persentase peningkatan jumlah prasarana pertanian dalam kondisi baik			
	Persentase lahan pertanian yang bebas dari bencana pertanian			
	Persentase peningkatan kelas kelompok tani			
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah			
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
21	Indeks kepuasan DPRD terhadap layanan Kesekretariatan (IKDPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Renstra Tahun 2024-2026	Tahunan
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap DPRD			
	Indeks layanan fungsi pembentukan perda DPRD			
	Indeks layanan fungsi anggaran			
	Indeks layanan fungsi anggaran			
	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah			
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			

1	2	3	4	5
22	Nilai komponen perencanaan kinerja Sakip	Badan Perencanaan Pembangunan Riset, dan Inovasi Daerah	Renstra Tahun 2024-2026	Tahunan
	Indeks Perencanaan Pembangunan			
	Presentase Hasil Riset Dan Inovasi yang Dimanfaatkan Dalam Perencanaan			
	Persentase Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sesuai ketentuan		RPD Tahun 2024-2026	
	Persentase perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan			
	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai			
	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai			
	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Perekonomian dan SDA yang tercapai			
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti			
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah			
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah			
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
23	Opini atas Audit BPK	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Renstra Tahun 2024-2026	Tahunan
	Persentase Penatausahaan Keuangan Daerah yang Baik			

1	2	3	4	5
	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Baik		RPD Tahun 2024-2026	
	Persentase Penatausahaan Keuangan Daerah yang Baik			
	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Baik			
	Kepuasan ASN terhadap Pelayanan kesekretariat Perangkat Daerah			
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD		LPPD	Tahunan
	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD			
	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya			
	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan			
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)			
	24		Realisasi PAD (Milyar)	Badan Pendapatan Daerah
Persentase Peningkatan Target PAD setiap tahunnya				
Jumlah ketetapan pajak daerah yang telah ditetapkan				
Jumlah laporan PAD yang tertib adminitrasi				
Jumlah pengajuan ke beratan/pengurangan yang diverifikasi (ajuan)				
Persentase pengajuan pelayanan pajak daerah				

1	2	3	4	5
	yang diselesaikan			
	Persentase peningkatan target pajak daerah			
	Persentase realisasi PAD tahun berkenaan			
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah			
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)		LPPD	Tahunan
25	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Renstra Tahun 2024-2026	Tahunan
	Merit Sistem			
	Nilai Dimensi Kualifikasi			
	Nilai Dimensi Kompetensi			
	Nilai Dimensi Disiplin			
	Nilai Dimensi Kinerja			
	Persentase kedisiplinan ASN		RPD Tahun 2024-2026	
	Persentase Mutasi jabatan sesuai kualifikasi dan Kompetensi			
	Persentase penetapan kebutuhan ASN			
	Persentase Penilaian Kinerja ASN			
	Persentasi ASN yang Lulus Pengembangan Kompetensi			
	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi			
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah			
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			

1	2	3	4	5
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		LPPD	Tahunan
	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			
26	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Inspektorat	Renstra Tahun 2024-2026	Tahunan
	Maturitas SPIP			
	Kapabilitas APIP			
	Result based SPIP			
	Indeks Manajemen Risiko			
	Efektifitas Pengendalian Korupsi			
	Persentase OPD yang mendapatkan nilai hasil evaluasi SAKIP Memuaskan			
	Persentase penyelenggaraan Pengawasan			
	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi			
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah			
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
27	Nilai SAKIP	Bagian Umum	Renstra Tahun 2024-2026	Tahunan
	Angka Kematangan Organisasi	Bagian Organisasi		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Bagian Organisasi		

1	2	3	4	5
	Persentase Kebijakan Bidang Administrasi Umum yang ditindaklanjuti	Bagian Administrasi Pemerintahan	RPD Tahun 2024-2026	
	Persentase Kebijakan Bidang pemerintahan dan Kesra yang ditindaklanjuti	Bagian Kesejahteraan Rakyat		
	Kebijakan Bidang Perekonomian Pembangunan yang ditindaklanjuti	Bagian Perekonomian		
	Indek Reformasi Hukum	Bagian Hukum		
	Persentase rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditetapkan	Bagian Kesejahteraan Rakyat		
	Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditetapkan sesuai kebutuhan	Bagian Administrasi Pemerintahan		
	Persentase rumusan kebijakan bidang Pembangunan yang ditindaklanjuti	Bagian Administrasi Pembangunan		
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Bagian Umum		
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Bagian Umum		
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Bagian Umum		
	Nilai Pelaporan	Bagian Organisasi		
	Persentase Rumusan Kebijakan Ketatalaksanaan Organisasi yang ditetapkan Sesuai kebutuhan	Bagian Organisasi		
	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Bagian Organisasi		
	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Bagian Organisasi		
	Nilai IKM	Bagian Organisasi		
	Persentase PD Pengampu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan mutu	Bagian Organisasi		

1	2	3	4	5
	Penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat sasaran	Bagian Organisasi		
	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		
	Persentase rumusan kebijakan strategis pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang ditindaklanjuti	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		
	Persentase rumusan kebijakan bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	Bagian Perekonomian		
	Persentase kegiatan keprotokolan dan komunikasi Pimpinan yang di fasilitasi	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		
	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif		LPPD	Tahunan
	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama			
	Persentase Nilai Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		RB Tematik 2023	Tahunan
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan		LPPD	Tahunan
28	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Kecamatan Balerejo	RPD Tahun 2024-2026	Tahunan
	Persentase Kepuasan Pelayanan Pemerintahan Umum			
	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa			

1	2	3	4	5
	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			
	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum			
	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah			
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			
29	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Kecamatan Dagangan	Renstra Tahun 2024-2026	Tahunan
	Persentase Kepuasan Pelayanan Pemerintahan Umum		RPD Tahun 2024-2026	
	Persentase Kepuasan Pelayanan Umum			
	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa			
	Persentase Layanan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			
	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum			
	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah			
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			

1	2	3	4	5
30	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Kecamatan Dolopo	Renstra Tahun 2024-2026	Tahunan
	Persentase Kepuasan Pelayanan Pemerintahan Umum			
	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa			
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			
	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum			
	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah			
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Bangunsari Dolopo)			
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Mlilir)			
31	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Kecamatan Geger	Renstra Tahun 2024-2026	Tahunan
	Persentase Kepuasan Pelayanan Pemerintahan Umum			
	Persentase Kepuasan Pelayanan Umum			

1	2	3	4	5
	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			
	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum			
	Persentase Layanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah			
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			
32	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Kecamatan Gemarang	Renstra Tahun 2024-2026	Tahunan
	Persentase Kepuasan Pelayanan Pemerintahan Umum			
	Persentase Kepuasan Pelayanan Umum			
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan			
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa			
	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			
	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum			
	Persentase Layanan Pembinaan dan			

1	2	3	4	5
	pengawasan pemerintahan desa Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			
33	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Persentase Kepuasan Pelayanan Pemerintahan Umum Persentase Kepuasan Pelayanan Umum Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai ketentuan Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Kecamatan Jiwan	Renstra Tahun 2024-2026	Tahunan
34	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Persentase Kepuasan Pelayanan Pemerintahan Umum Persentase Kepuasan Pelayanan Umum	Kecamatan Kebonsari	Renstra Tahun 2024-2026	Tahunan

1	2	3	4	5
	Presentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Presentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Presentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Presentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Presentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			
35	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Presentase Kepuasan Pelayanan Pemerintahan Umum Presentase Kepuasan Pelayanan Umum Presentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Presentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Presentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Presentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Presentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kecamatan Kare	Renstra Tahun 2024-2026	Tahunan

1	2	3	4	5
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah			
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			
36	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Kecamatan Madiun	Renstra Tahun 2024-2026	Tahunan
	Persentase Kepuasan Pelayanan Pemerintahan Umum			
	Persentase Kepuasan Pelayanan Umum			
	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa			
	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			
	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum			
	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah			
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Nglames)			
37	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Kecamatan Mejayan	Renstra Tahun 2024-2026	Tahunan
	Persentase Kepuasan Pelayanan Pemerintahan Umum			
	Persentase Kepuasan			

1	2	3	4	5
	Pelayanan Umum			
	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
	Persentase layanan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Bangunsari			
	Persentase layanan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Krajan			
	Persentase layanan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pandean			
	Persentase layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			
	Persentase layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (bangunsari mejayan)			
	Persentase layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (krajan)			
	Persentase layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (pandean)			

1	2	3	4	5
38	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Kecamatan Pilangkenceng	RPD Tahun 2024-2026	Tahunan
	Persentase Kepuasan Pelayanan Pemerintahan Umum			
	Persentase Kepuasan Pelayanan Umum			
	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			
	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum			
	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah			
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
39	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Kecamatan Sawahan	Renstra Tahun 2024-2026	Tahunan
	Persentase Kepuasan Pelayanan Pemerintahan Umum			
	Persentase Kepuasan Pelayanan Umum			
	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
	Persentase Layanan koordinasi ketentraman			

1	2	3	4	5
	dan ketertiban umum			
	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum			
	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah			
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			
40	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Kecamatan Saradan	Renstra Tahun 2024-2026	Tahunan
	Persentase Kepuasan Pelayanan Pemerintahan Umum			
	Persentase Kepuasan Pelayanan Umum			
	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			
	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum			
	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah			
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			

1	2	3	4	5
41	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Kecamatan Wungu	Renstra Tahun 2024-2026	Tahunan
	Persentase Kepuasan Pelayanan Pemerintahan Umum			
	Persentase Kepuasan Pelayanan Umum			
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			
	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum			
	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah			
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Wungu)			
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Munggut)			
42	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Kecamatan Wonoasri	Renstra Tahun 2024-2026	Tahunan
	Persentase Kepuasan Pelayanan Pemerintahan Umum			
	Persentase Kepuasan Pelayanan Umum			

1	2	3	4	5
	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa			
	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			
	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum			
	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah			
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			
43	Indeks Keamanan Manusia di Kabupaten Madiun	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Renstra Tahun 2024-2026	Tahunan
Persentase Pencegahan Konflik	RPD Tahun 2024-2026			
Indeks Solidaritas				
Persentase penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan				
Indeks Demokrasi Indonesia				
Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina				
Indeks Toleransi				
Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi di wilayah				
Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan				

1	2	3	4	5
	Perangkat Daerah			
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
44	Pertumbuhan Ekonomi	Badan Pusat Statistik	Data Makro Pembangunan	Tahunan
	Persentase Peningkatan : PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan			
	Persentase Peningkatan : PDRB Sektor Industri Pengolahan,			
	Persentase Peningkatan : PDRB Sektor Perdagangan			
	Nilai Realisasi Investasi			
	Persentase Penduduk Miskin			
	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku			
	Pengeluaran Perkapita			
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			
	Angka Harapan Hidup			
	Harapan Lama Sekolah			
	Indeks Kedalaman Kemiskinan			
	Indeks Keparahan Kemiskinan			
	Rasio Gini			
	Rata-rata Lama Sekolah			
	Tingkat Partisipasi			

1	2	3	4	5
	Angkatan Kerja			
	Tingkat Pengangguran Terbuka			
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat		SDGs	Tahunan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat		SDGs	Tahunan
	Persentase angka melek aksara penduduk umur >15 tahun		SDGs	Tahunan


Bp. BUPATI MADIUN
TONTO PAHLAWANTO